



LAPORAN EVALUASI CAMAT TRIWULAN IV

TAHUN 2025



BAB I

PENDAHULUAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan 25 (dua puluh lima) yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan daan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum

1. Penyelenggaraan urusna pemerintahan umum sesuai penugasan kepl daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pembentukan Organisasi Kantor Camat Kalaena ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur,

Kedudukan Kantor Camat Kalaena yang dipimpin oleh camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan/desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Camat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Camat pada Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas dan fungsi yaitu:

1. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
4. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan;
5. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kecamatan;
6. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Kecamatan;
7. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum;
8. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
9. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
10. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
11. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
12. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan;

13. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
14. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
15. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati;
16. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diperjanjikan 2 Sasaran 6 program, Adapun 6 program sesuai yang tercantum dalam perjanjian kinerja yaitu sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Program penunjang urusan pemerinthan daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)	100%
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah;	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan sesuai standar (%)	100%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	100%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerinthan Desa yang dilaksanakan	100%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 2,419,546,504	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 6,403,000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 84,306,500	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19,984,500	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18,845,000	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 13,137,500	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 2,608,994,150	APBD

A. Rencana Aksi (RA)

Berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, Camat melaksanakan kegiatan sesuai rencana aksi dalam mewujudkan pencapaian dalam pertriwulan.

Tabel 2.3

Rencana Aksi Berdasarkan Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Anggaran T.A 2025 Camat

NO	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) & Kegiatan (Output)	TW I		TW II		TW III		TW IV	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN SESUAI STANDAR	100%	898,478,600	100%	697,245,050	100%	417,005,750	100%	472,567,104
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu (%)	100%	6,940,000	100%	7,570,000	100%	11,892,500	100%	12,890,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1,500,000	1 Dok	4,668,000	1 Dok	5,935,000	1 Dok	3,000,000
	Kordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-	-	1 Dok	2,779,500	1 Dok	2,534,000
	Kordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1,985,500	-	-	-	-	1 dok	2,294,000
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dok	3,454,500	2 Dok	2,902,000	2 Dok	3,178,000	2 Dok	5,062,000

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang terselesaikan dengan baik	100%	737,401,050	100%	555,766,250	100%	305,751,450	100%	140,564,004
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan Tunjangan nya terbayarkan	15	732,628,800	15	549,471,600	29	299,445,500	29	131,884,554
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	3	5,031,450	3	5,778,450	3	6,305,950	3	8,679,450
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar	100%	2,678,000	100%	3,171,000	100%	3,469,000	100%	4,541,000
-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang Disusun	3	2,678,000	3	3,171,000	3	3,469,000	3	4,541,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	8,150,500	100%	1,865,000	100%	1,542,000	100%	1,405,000
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	1,842,500	3	1,405,000	3	1,542,000	3	1,405,000
	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2	6,668,000	1	460,000			3	
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	71,027,500	100%	47,080,500	100%	50,778,500	100%	131,137,500

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakanJumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10	1,464,000	10	497,000	10	609,00	10	497,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20	3,514,500	20	1,530,500	20	2,160,500	20	1,465,500
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	4,560,000	4	4,560,000	4	4,560,000	2	6,760,000
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	1,470,000	12	1,470,000	12	1,470,000	12	1,470,000
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	3	41,320,000	3	20,320,000	3	26,520,000	3	57,040,000
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3	18,699,000	3	19,463,000	3	15,459,000	3	69,905,000
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	-	-	-	-	-	-	100 %	65,750,000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	-	-	-	7	11,750,000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	3	54,000,000
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	59,558,350	100 %	72,738,500	100 %	31,323,300	100 %	100 %	100 %	25,789,600
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	4,544,850	3	3,795,000	3	4,379,000	3	3	3	3,448,500
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3	12,703,500	3	12,703,500	3	7,554,300	3	3	3	2,021,100
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	4,150,000	1	4,150,000	1	4,150,000	1	1		
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3	38,160,000	3	56,240,000	3	15,240,000	3	3	3	20,320,000
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan Baik	100	12,104,000	100	8,810,000	100	12,249,000	100	100	100	84,490,000
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	10,774,000	7	3,270,000	7	9,069,000	7	7	7	2,790,000
- Pemeliharaan Mabel	Jumlah Mebel yang dipelihara			2	860,000						

	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1,330,000		4,680,000		3,180,000		1,330,000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						2	80.370.000
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DN PELAYANAN PUBLIK	100%	423,300	100%	829,950	100%	100%	829,950
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yng dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100%	423,300	100%	829,950	100%	100%	829,950
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang di laksanakan	3	423,300	3	829,950	3	3	829,950
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	25,244,500	100%	15,704,500	100%	100%	27,252,500
	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa;	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100%	25,244,500	100%	15,704,500	100%	100%	27,252,500
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	11,139,500	-	-	-	-	-

	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	14,105,000	3	15,704,500	3	16,105,000	3	27,252,500
04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG DILAKSANAKAN	100	5,633,500	100	4,460,000	100	5,431,000	100	4,460,000
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	4,301,000	100%	3,505,500	100%	4,172,500	100%	3,505,500
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	2,489,000	1	2,046,000	1	2,418,000	1	2,046,000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	1,812,000	1	1459500	1	1,754,500	1	1,459,500
	Koordinasi Penerpam dan penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	1,332,500	100%	954,500	100%	1,258,500	100%	954,500
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	1,332,500	1	954,500	1	1,258,500	1	954,500

05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN	100	3.724.000	100	4.935.000	100	5.251.000	100	4.935.000
	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	3.724.000	100	4.935.000	100	5.251.000	100	4.935.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi di Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti	3	3.724.000	3	4.935.000	3	5.251.000	3	4.935.000
06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU	100	6.087.750	100	1.204.000	100	1.389.750	100	4.467.500
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100	6.087.750	100	1.204.000	100	1.389.750	100	4.467.500
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14	4.625.000					14	3.263.500
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan	7	1.462.750	7	1.204.000	7	1.389.750	7	1.204.000

BAB III REALISASI KINERJA

A. Capaian Kinerja Camat

Berdasarkan evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Berdasarkan Evaluasi Atas Rencana Aksi sampai dengan triwulan III Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut;

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota ini memiliki 8 Kegiatan dan 25 sub Kegiatan, dengan target yang ditetapkan yaitu 100% realisasi 98% sehingga capaian kinerjanya yaitu 98%.

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	s.d Triwulan IIV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1.1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	98	98	Sangat baik
1.	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerahh</i>	100	100	100	Sangat baik
	- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3	3	100	Sangat baik
	- Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2	2	100	Sangat baik
	- Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2	2	100	Sangat baik
	- Evaluasi kinerja perangkat daera	10	10	100	Sangat baik
Jumlah		400			
Rata-rata capaian		100%			
2.	<i>Administrasi keuangan perangkat daerah</i>	100	94	94	Sangat baik

	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	29	26	89	Sangat baik
	- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12	12	100	Sangat baik
Jumlah		189			
Rata- Capaian		94%			
3.	<i>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	100	100	100	Sangat baik
	- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	12	12	100	Sangat baik
Jumlah		100			
Rata-rata capaian		100			
4.	<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100	116	116	Kurang
	- Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12	12	100	Sangat baik
	- Bimbingan teknis implelementasi peraturan perundang-undangan	6	8	133	
Jumlah		233			
Rata-rata capaian		116			
5.	<i>Administrsi umum perangkat daerah</i>	100	94	94	
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10			
	- Penyediaan bahan logistik kantor	20	14	70	Kurang

	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2	2	100	Sangat baik
	- Penyediaan bahan bacaan peraturan prundang-undangan	48	48	100	Sangat baik
	- Fasilitasi kunjungan tamu	12	12	100	Sangat baik
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	12	100	Sangat baik
Jumlah		470			
Rata-rata capaian		100%			
6	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	100	100	Sangat baik
	- <i>Pengadaan Mebel</i>	7	7	100	Sangat baik
	- <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	3	3	100	Sangat baik
Jumlah		200			
Rata-rata capaian		100%			
7	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	100	100	Sangat baik
	- Penyediaan jasa surat menyurat	12	12	100	Sangat baik
	- Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	Sangat baik
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	2	2	100	Sangat baik
	- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	12	100	Sangat baik
Jumlah		400			
Rata-rata capaian		100%			
8.	<i>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100	41	41	Kurang

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7	7	100	Sangat Baik
- Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	19	5	26	Kurang
- Pemeliharaan Mebel	2	2	100	Sangat Baik
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	2	100	Sangat Baik
Jumlah	326			
Jumlah rata-rata	81%			

• **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah 86% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Kegagalan:

- Untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik tidak terealisasi pada Triwulan IV dikarenakan adanya pemeliharaan bangunan Kantor.
- Untuk sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tidak mencapai target yang ditentukan dikarenakan mimimnya cetak baliho dan Spanduk

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. *Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha*

Indikator sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan target sampai dengan triwulan IV yaitu 12 Dokumen dan terelisasi 12 Dokumen sehingga capaiannya 100%. Dokumen yang terealisasi pada sub kegiatan ini yakni 12 Dokumen yaitu Dokumen Perizinan Non Usaha bulan Januari- September yang didalamnya meliputi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan permintaan jumlah laporan penduduk, pendataan rekapitulasi dan mutasi kependudukan, pelayanan rekomendasi, dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintahan kecamatan, pemantauan dan koordinasi kepada pihak terkait dalam hal kebersihan wilayah.

Tabel capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat:	100	100	100	
	1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	12	12	100	Sangat Baik
Jumlah		12	12	100	
Jumlah rata-rata		100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah 100% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Tersusunnya Dokumen Perizinan Non Usaha bulan Januari s.d Desember.

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Target yang ditetapkan 100% dan capaian

kinerjanya sebesar 100%. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa.

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Target yang ditetapkan s.d Triwulan IV yaitu 5 Lembaga Kemasyarakatan dan terealisasi sebanyak 5 Lembaga Kemasyarakatan yang meliputi Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Indikator sub kegiatan ini Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sampai dengan Triwulan IV dengan target 12 Laporan dan realisasi 12 Laporan.

Tabel capaian kinerja sebagai berikut:

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Keluarahan	100	100	100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	5	5	100%	Sangat Baik
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	100%	
Jumlah		17	17	200	
Jumlah rata-rata		100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah 100% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis

pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Pada Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa Target yang ditetapkan pada Triwulan I yaitu 5 Lembaga Kemasyarakatan dan terealisasi sebanyak 5 Lembaga Kemasyarakatan yang meliputi Karang Taruna, Rukun Tetangga/Rukun Warga, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pendmping.
- Pada Sub Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terealisasi sebanyak 12 Laporan Bulanan, yang disusun setiap bulannya.

D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator program ini adalah persentase rata-rata kinerja pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut:

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah:

Tabel capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	100	
	2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	4	100	
Jumlah		8	8	200	
Jumlah rata-rata		100			

2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	
	1.Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	100	
Jumlah		4	4	100	
Jumlah rata-rata		100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah 100% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor pendukung keberhasilan:

1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan target sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV adalah 4 Laporan yaitu:
 - ✚ Tersusunnya Laporan terkait pengamanan dan ketertiban pada saat menjelang Bulan Suci Ramadhan tahun 2025.
 - ✚ Laporan Terkait Rapat untuk mengantisipasi keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan musim panen padi pertama tahun 2025.
 - ✚ Laporan Terkait Rapat Keamanan dan Ketertiban "Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD" Kab. Luwu Timur.
 - ✚ Rapat Koordinasi dalam rangka menghadapi Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026

2. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat target sub kegiatan sampai dengan Triwulan IV adalah 4 Laporan yaitu:
- ✚ Tersusunnya Laporan terkait mengantisipasi keamanan dan ketertiban menjelang bulan Ramadhan (Puasa) tahun 2025.
 - ✚ Laporan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat menghadapi maraknya kejadian Perkawinan Dini di tahun 2025.
 - ✚ Laporan Harmonisasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dengan pemerintah Kecamatan Kalaena Kab. Luwu Timur Tahun 2025
 - ✚ Rapat Koordinasi dalam rangka menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru.
3. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia target sub kegiatan sampai dengan Triwulan IV adalah Laporan yaitu:
- ✚ Tersusunnya Laporan Koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten terkait masalah Keamanan dan Ketertiban menjelang Bulan Puasa.
 - ✚ Laporan Koordinasi di Kantor Kesbangpol tentang maraknya Lembaga LSM atau ormas yang ada di Kecamatan Kalaena.
 - ✚ Laporan Koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait dampak Penambang ilegal di Desa Pertasi Kencana
 - ✚ Koordinasi Ke satpol Pp, Kapolsek mangkutana dalam rangka pengamanan Nataru.

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Indikator program ini adalah persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut: Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah:

Tabel capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan IV			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala daerah	100	100	100	Sangat Baik
	1.Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	100	Sangat Baik
Jumlah		12	12	100	100%
Jumlah Rata-Rata		100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah 100% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor pendukung keberhasilan:

1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan target sub kegiatan ini sampai dengan Triwulan IV adalah 12 Laporan yaitu:
 - ✚ Tersusunnya Laporan terkait Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan tanggal 22 Januari 2025 terkait meningkatkan Efektifitas dan harmonisasi kerja forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcaam) tingkat kecamatan kalaena.
 - ✚ Tersusunnya Laporan terkait Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 28 Februari 2025 terkait rapat FORKOPIMCAM Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan menjelang Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2025 M.

- ✚ Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanggal 25 Maret 2024 terkait Rapat persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
- ✚ Tersusunnya Laporan terkait Rapat dalam rangka menjaga sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan Program pembangunan antar lintas sektoral termasuk dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan (FORKOPIMCAM).
- ✚ Tersusunnya Laporan terkait Rapat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 H dan Pelaksanaan Qurban.
- ✚ Tersusunnya Laporan terkait Rapat koordinasi dalam rangka memeriahkan dan memperingati dirgahayu hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 80 tingkat Kecamatan Kalaena.
- ✚ Tersusunnya Laporan terkait Laporan Rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan HUT RI ke 80 serta persiapan lomba kebersihan
- ✚ Tersusunnya Laporan terkait Laporan Rapat menjaga sinergitas diwilayah kecamatan kalaena
- ✚ Tersusunnya Laporan terkait Laporan Rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan antar lintas sektoral.
- ✚ Rapat dalam rangka menjaga sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan antar lintas sektoral termasuk dengan forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
- ✚ Rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan (FORKOPIMCAM) tingkat kecamatan kalaena
- ✚ Rapat dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi forum pimpinan kecamatan (FORKOPIMCAM) tingkat kecamatan kalaena

F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator program ini adalah Persentase Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Target yang ditetapkan 100% capaian Kinerjanya sebesar 100% dengan tabel capaian sebagai berikut:

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program ini adalah:

No	Sub Kegiatan	s.d Triwulan III			Predikat Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	100	Sangat Baik
	1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	14	14	100	Sangat Baik
	2. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7	7	100	
Jumlah		21	21	100	
Jumlah rata-rata		100%			

- **Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.**

Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 adalah 100% dari target yang di rencanakan. Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya:

Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Pada Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa target yang ditetapkan yaitu 14 Dokumen dan terealisasi 14 Dokumen Adapun Dokumen yang dihasilkan yaitu 7 Dokumen Asistensi APBDes Pokok yang meliputi Dokumen Asistensi Desa Kalaena Kiri, Desa Pertasi Kencana, Desa Mekar Sari, Desa Non Blok, Desa Sumber Agung, Desa Sumber Makmur, Desa Argomulyo. Serta 7 Dokumen Asistensi APBDes Perubahan yang meliputi Dokumen Asistensi Desa Kalaena Kiri, Desa Pertasi Kencana, Desa Mekar Sari, Desa Non Blok, Desa Sumber Agung, Desa Sumber Makmur, Desa Argomulyo.
- Pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang ditetapkan yaitu 7 Laporan dan

teralisasi sebanyak 7 laporan yang meliputi Laporan BKK Desa Kalaena Kiri, Laporan BKK Desa Pertasi Kencana, Laporan BKK Desa Mekar Sari, Laporan BKK Desa Non Blok, Laporan BKK Desa Sumber Agung, Laporan BKK Desa Sumber Makmur, Laporan BKK Desa Argomulyo.

BAB IV REALISASI KEUANGAN

Realisasi keuangan atas pelaksanaan pada Teknis dan Sekretariat disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN	s.d TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.485.296.504	2.419.546.504	2.332.305.483	96,39%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6,403,000	6,403,000	6.214.250	97,05%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	84.306.500	84.306.500	78.794.653	93,46%
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.984.500	19.984.500	19.455.100	97,35%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	18.845.000	18.845.000	18.773.000	99,62%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.137.500	13.137.500	10.690.000	81,37%
Jumlah		2.627.973.004	2.562.223.004	2.466.232.486	96,25%
Rata-rata Capaian Keuangan		93,85%			

BAB V

PENUTUP

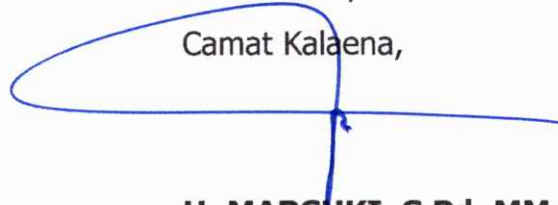
Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Realisasi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV sebesar **Rp. 2,562,223,004,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 2,466,232,486** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **93,85%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran ataupun informasi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain. Diharapkan untuk tahun mendatang, kinerja Kecamatan Kalaena dapat lebih ditingkatkan lagi.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Kalaena Kiri, 30 Desember 2025

Camat Kalaena,



H. MARSUKI, S.Pd., MM

Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. :19691025 199802 1 004